



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN SINGKAT
PERTEMUAN WAKIL KETUA DPR RI/KORKESRA
DENGAN
KONSTITUEN PROVINSI MALUKU

- Tahun Sidang : 2021-2022
Masa Persidangan : I
Jenis Rapat : Pertemuan
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Senin, 23 Agustus 2021
Waktu : 15.00 WIB s.d Selesai
Tempat : Swiss Bell Hotel, Jl. Benteng Kapaha Uritetu Ambon Provinsi Maluku
- Acara : Gus Muhaimin Mendegar Konstituen Provinsi Maluku
Ketua : Dr. H. A. Muhaimin Iskandar, M.SI, Wakil Ketua DPR RI/Korkesra
- Sekretaris Rapat : Susantomo S.I.P M.AP.
Hadir : **1. Pimpinan**
- Dr. H. A. Muhaimin Iskandar, M.SI
2. Narasumber
- Paulus Tititheru
- Ichsan Djalil
3. Peserta Offline
- Prof Fredy Leiwakabessy
- Dr Melky Pentury
- Mukmin Refra
- Pdt. Rudi Rehabeat
- Vinsensius Talubun
- Tagop Solussa
4. Staf Khusus dan Tenaga Ahli Watua DPR RI/Korkesra
5. Staff

I. PENDAHULUAN

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tentang Tata Tertib.
3. Bahwa Anggota Dewan adalah pejabat *elected* sebagai pemegang amanah suara rakyat, wajib melakukan agregasi dan artikulasi terhadap kehendak dan aspirasi rakyat.
4. Bahwa Anggota DPR RI wajib memperjuangkan program pembangunan untuk daerah pemilihan.

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

Pertemuan Wakil Ketua DPR RI dengan Masyarakat Provinsi Maluku dilakukan secara Hybrid (Virtual dan offline) dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

Dalam kesempatan ini, Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra lebih banyak mendengar aspirasi dari masyarakat Maluku mulai dari praktisi kesehatan, Pendidikan, pelaku UMKM, pegiat literasi desa, Pendeta, Mahasiswa, kepala desa serta tokoh masyarakat lainnya.

Tanggapan Masyarakat

Pdt. Rudi Rehabeat dari Sinode Gereja Protestan Maluku, mengharapkan agar Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra bisa membantu atau menjembatani disparitas pembangunan yang ada di Maluku. Menurutnya, dalam pembangunan wilayah, peran agama menjadi sangat penting. Disisi lain, dukungan dari negara menjadi hal mutlak yang harus dilakukan untuk memajukan Maluku seperti daerah lain di Indonesia.

Vinsensius Talubun, mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM), mengeluhkan berbagai kebijakan penanganan pandemi yang selama ini ada di Maluku, terutama soal anggaran pemulihan ekonomi yang ada pada APBD. Penggunaan anggaran APBD di Maluku dalam hal Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN masih kurang transparan dan banyak yang tidak sesuai. Disisi lain, menurut Vinsensius Talubun, ruang kebebasan bagi masyarakat juga sangat dibatasi, serta terjadi eksploitasi sumber daya alam di Maluku yang cukup memprihatinkan.

Anggota DPRD Provinsi Maluku Mukmin Refra mengatakan, negara harus memperhatikan Maluku karena sejarah mencatat peran besar Maluku dalam sejarah Indonesia. Maluku minta keadilan negara. Butuh Maluku baru di masa depan dengan menghilangkan imej Maluku sebagai provinsi miskin ke-4 di Indonesia.

Mantan Bupati Buru Selatan Tagop Solussa menambahkan, fakta bahwa Maluku masuk sebagai provinsi termiskin ke-4 di Indonesia sungguh memprihatinkan. Karena itu, menurutnya, diperlukan intervensi pemerintah pusat untuk menuntaskan persoalan kemiskinan yang sangat kompleks di Maluku. Selama ini Maluku hanya mengandalkan penerimaan negara. Perlu ada percepatan kebijakan strategis melalui pengesahan regulasi (RUU Provinsi Kelautan dan Pesisir). Tagop Solussa mengatakan, potensi peningkatan pembangunan harus dilakukan melalui penguatan infrastruktur dengan mengeksplorasi pertambangan (Blok Masela), seperti percepatan di Papua.

Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Patimura Prof Fredy Leiwakabessy mengharapkan adanya kemudahan pembiayaan pendidikan dan kesempatan yang sama mendapatkan akses pendidikan. Misalnya, beasiswa dan sarana perguruan tinggi dengan model akreditasi yang selama ini dinilai kurang adil. Maluku perlu penambahan perhatian. Dalam hal Standar Pelayanan Prima, Maluku masih perlu dorongan agar tercapai tingkat kualitas pelayan melalui intervensi program pemerintah.

Dr Melky Pentury dari Universitas Kristen Indonesia Maluku mengatakan, ada 44 PT swasta di Maluku-Maluku Utara, 24 di antaranya di Maluku. Menurutnya, selama ini alokasi anggaran untuk kesetaraan program KIP Kuliah di Maluku belum cukup adil.

Tanggapan A. Muhaimin Iskandar

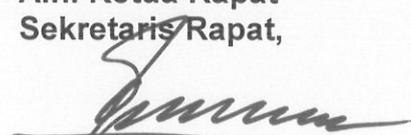
Menanggapi berbagai keluhan masyarakat, Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra mengatakan dirinya mengatakan bahwa memang ingin menyerap masukan sebanyak-banyaknya aspirasi dari masyarakat untuk ditindaklanjuti dan disampaikan secara langsung kepada pemerintah.

Dari berbagai aspirasi masyarakat Maluku yang disampaikan, tentu akan kami tindaklanjuti. Tadi ada berbagai persoalan, mulai disparitas pembangunan, persoalan kemiskinan di Maluku, termasuk penanganan pandemi. Ini menjadi masukan yang cukup bagus dan akan saya sampaikan ke kementerian terkait, termasuk kepada Bapak Presiden.

III. PENUTUP

Pertemuan ditutup Pukul 16.15 WIB

**A.n. Ketua Rapat
Sekretaris Rapat,**



Susantomo, S.I.P. M.AP.